

KPK-Polri Sambungan hal 1

Menurutnya, jika konflik KPK-Polri tidak segera diselesaikan, Indonesia menggali kuburan masa mendatang. Untuk itu Tim Independen harus membela yang baik.

"KPK dan Polri harus dibersihkan dari oknum-oknum yang ingin menghancurkan penegakan hukum. KPK dan Polri harus tahan diri, jangan saling menjatuhkan," tegasnya.

Sedang mengenai hak imunitas bagi pimpinan KPK, dikatakan Syafii, hal itu memang baru wacana, dengan harapan untuk melindungi pimpinan KPK dari serangan segala penjurur. "Kebal hukum ini bukan berarti KPK tidak diproses hukum. Kalau memang ada kesalahan, ya bisa diproses. Paling tidak, imunitas ini untuk menangkal dari serangan segala penjurur," katanya.

Sedangkan Rektor UMY, Prof Dr Bambang Cipto MA menyatakan, civitas akademika perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia memberi dukungan moral kepada KPK agar tetap terus bekerja secara maksimal melakukan pemberantasan korupsi. "Kami mencintai dan mengharapkan kinerja KPK dan Polri untuk melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan perundangan. Kami akan memberi dukungan moral kepada KPK dan menentang segala bentuk upaya kriminalisasi terhadap KPK," tandasnya.

Terpisah, Ketua Umum PP Aisyiyah Dra Siti Noordjanah Djohantini MM MSi menga-

takan, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dapat mengambil langkah bijak dalam menyelesaikan konflik KPK-Polri. "Langkah tegasnya adalah memilih pejabat yang jangan sampai terindikasi kejahatan. Karena itu, pencalonan BG harus ditarik dan presiden mengusulkan calon Kapolri yang bersih. Saya kira stok di kepolisian banyak," tandasnya usai menyampaikan pernyataan sikap PP Aisyiyah tentang penguatan KPK dan pemberantasan korupsi.

Dalam pernyataan sikap di Kantor PP Aisyiyah Jl KHA Dahlan, hadir pula pimpinan lain di antaranya Hj Shoimah Kastolani, Hj Hadiroh Ahmad. Dalam pernyataan sikapnya, Noordjanah menyebutkan mendukung KPK untuk tetap istiqamah menjalankan tugas utama memberantas korupsi. "Kami menolak setiap upaya pelemahan KPK dalam bentuk apapun, dalih apapun dan oleh siapapun," tandasnya.

Sementara elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Pembodohan menggelar aksi damai di kawasan Titik Nol Km (Perempatan Kantor Pos Besar) Yogyakarta, Senin. Menurut Koordinator Umum Aksi, Nasrudin, kedua lembaga yakni KPK dan Polri diharapkan bisa berjalan kondusif. "Kedua institusi ini kan sama-sama sebagai penegak hukum. Kenapa keduanya jadi bertikai. Ada apa ini," papar Nasrudin.

(Sni/Roy/Fsy/*-1)-d